



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PENGUMUMAN
SELEKSI PENGADAAN JASA LAINNYA PERORANGAN
DI LINGKUNGAN BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL**

Dalam rangka memenuhi formasi Pengadaan Jasa Perorangan Lainnya (PJLP) di Lingkungan Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Digital memberi kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mendaftar pada posisi dimaksud berdasarkan ketentuan berikut:

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1	Tenaga pendukung bidang Perancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumentasi Hukum (Penelaah Teknis Kebijakan)	Pendidikan Minimal S1/DIV Manajemen/ Ilmu Hukum/ Ilmu Komunikasi/ Kearsipan/ Desain Komunikasi Visual	1
2	Tenaga pendukung bidang Penanganan Perkara (Penelaah Teknis Kebijakan)	Pendidikan Minimal S1 Ilmu Hukum	1

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

I. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
2. Berusia maksimal 28 tahun.
3. Membuat surat lamaran kerja yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum.
4. Membuat Daftar Riwayat Hidup/*Curriculum Vitae*.
5. Mampu bekerja secara tim dan individu.
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan.
7. Diutamakan memiliki IPK paling rendah 3,20.
8. Mampu mengoperasikan *website* pemerintah dan *microsoft office*.
9. Tidak sedang bekerja/terikat kontrak dengan pihak lain.
10. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi CASN/ASN di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital.
11. Bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi.

II. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Membuat akun pada laman <https://seleksi.komdigi.go.id>.
2. Unggah dokumen sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Daftar Riwayat Hidup/*Curriculum Vitae*.
 - c. Scan Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir.
 - d. Pas foto terbaru berlatar merah.
 - e. Surat keterangan sehat dari Unit Kesehatan Pemerintah.
 - f. Surat keterangan pengalaman bekerja (jika ada).
 - g. Dokumen lain untuk mendukung jabatan yang dilamar (jika ada).

III. TAHAPAN DAN JADWAL

No.	Tahapan	Tanggal
1	Pengumuman	8-14 Mei 2026
2	Pendaftaran	11-14 Mei 2026
3	Seleksi Administrasi	18-19 Mei 2026
4	Pengumuman Seleksi Administrasi	20 Mei 2026
5	Seleksi Kompetensi Teknis	21 Mei 2026
6	Pengumuman Hasil Seleksi Teknis	22 Mei 2026
7	Wawancara	25 Mei 2026
8	Pengumuman akhir	29 Mei 2026

*Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu.

IV. KETENTUAN LAIN

1. Proses dan seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun.
2. Seluruh peserta wajib:
 - a. mengikuti perkembangan seleksi ini melalui laman <https://seleksi.komdigi.go.id>;
 - b. memastikan dokumen yang diunggah dapat dibuka/file tidak rusak.
3. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya lain yang dikeluarkan untuk mengikuti seleksi ini ditanggung oleh peserta.
4. Peserta yang terbukti memberikan keterangan/data dengan tidak benar, maka keikutsertaan/kelulusannya sebagai peserta digugurkan secara sepihak oleh panitia.
5. Panitia seleksi tidak menerima berkas lamaran yang langsung disampaikan ke kantor Kementerian Komunikasi dan Digital.
6. Peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Teknis adalah peserta yang memiliki IPK tertinggi dengan kesesuaian program studi paling banyak 5 (lima) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan.
7. 3 (tiga) peserta dengan hasil seleksi kompetensi teknis terbaik berhak mengikuti seleksi wawancara.
8. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu yang ditentukan, maka dinyatakan gugur.
9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka panitia seleksi dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya.
10. Keputusan panitia seleksi bersifat mutlak.

Jakarta, 5 Mei 2026
Kepala Biro Hukum

Radita Ajie